



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANUNG ADI NUGROHO
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
3. NHK : 868244

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.005.001.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 756.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/78 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 691.000.000
3. Tanah Seluas 1.886 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 281 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m²/72 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 141.001.000
6. Tanah Seluas 515 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 181.900.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GE81.5S MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA NSR 150 Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA C100 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



4. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.		
32.900.000		
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.		
20.000.000		
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.		
20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	51.650.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.793.465.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	864.616.687
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.896.632.687
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.896.632.687

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.